

**RENCANA AKSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBLINGGO TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS					INDIKATOR KINERJA				TARGET TRIWULAN			
										I	II	III	IV
										10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri					Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri							50M
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri yang difasilitasi	80%	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah RPIK dan RAPERDA	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Sosialisasi Penetapan Perda Rencana Pembangunan Industri Kota RPIK)	√				
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Peningkatan Mutu Batik bagi IKM Kec. Wonoasih 20 org	√				
								Bimtek Penyusunan Pelaporan Pajak bagi IKM 50 org		√			
								Bimtek Desain Kemasan Produk 30 org			√		
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pameran Batik Bordir dan Asesoris (Surabaya)	√				
								Fasilitasi Merk 10 IKM	√				
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi pemberdayaan industri		√			
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Monitoring dan Evaluasi - Pembinaan Industri	√											
2.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase ijin usaha industri yang difasilitasi	80%	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase industri yang mematuhi ijin usaha industri	80%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pembinaan Perizinan Industri dan Pengawasan Lapangan	√	√	√		
								Rapat Koordinasi Pembinaan Perizinan Industri dan Pengawasan			√		
3.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	80%	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaku industri yang menyampaikan laporan data industri	80%	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) - Sosialisasi, pemutakhiran data industri			√		

1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal			Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal								93,30%
1	PROGRAM PELATIHAN	Persentase peningkatan	89,3%	Pelaksanaan Pelatihan	Persentase sertifikat pelatihan	214	Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Pelatihan kejuruan	√	√	√	√
	PROGRAM	Persentase penempatan	99,3%	Pelayanan antar Kerja di	Jumlah peserta yang terlayani	820	Koordinasi Lintas Lembaga dan	Terlaksananya Koordinasi Lintas	√	√	√	√
				Pengelolaan Informasi	Persentase penempatan	80%	Pelayanan antar Kerja	Pelaksanaan Workshop foto	√			
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang terlayani pada layanan terpadu CPMI	1000	Perluasan Kesempatan Kerja	Pemberian pembekalan dan		√		
							Job Fair/Bursa Kerja	Pelaksanaan Job fair			√	
							Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Sosialisasi Antar Kerja Antar Negara				√
1	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja			Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja								70%
				Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial								56%
1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70%	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya	Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pemenuhan persyaratan kerja	130	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Sosialisasi syarat-syarat kerja (UMK dan Jasmkostek) kepada perusahaan	√			√
		Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	56%									
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan enjuran dan perjanjian bersama	79	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pencegahan hubungan industrial	Terlaksananya kunjungan dan pembinaan Tim Deteksi Dini pada perusahaan		√		√

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO

